

**DISHARMONISASI NORMA TENTANG PENENTUAN CALON  
LEGISLATIF BAGI MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM  
PEMILIHAN UMUM 2024**

**TESIS**



*Oleh:*

**Aisyah Fitri Kholifah  
NIM: 02040422002**

**Dosen Pembimbing I:**

Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H  
NIP. 196808262005012000

**Dosen Pembimbing II:**

Dr. H. Nafi Mubarak, S.H., M.H., M.HI  
NIP. 197404142008011000

**MAGISTER HUKUM TATA NEGARA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Fitri Kholifah

NIM : 02040422002

Prodi : Magister Hukum Tata Negara

Judul : Disharmonisasi Norma Tentang Penentuan Calon Legislatif Bagi  
Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum 2024

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dari sumbernya

Surabaya, 14 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Aisyah Fitri Kholifah

NIM.02040422002

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Aisyah Fitri Kholifah

NIM : 02040422002

Prodi : Magister Hukum Tata Negara

Judul : Disharmonisasi Norma Tentang Penentuan Calon Legislatif  
Bagi Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum 2024

Tesis yang ditulis ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian

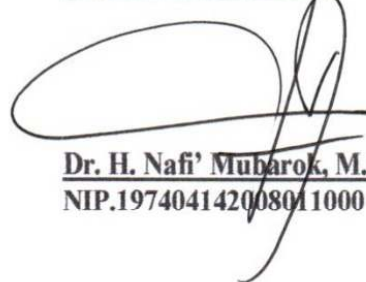
Surabaya, 14 Desember 2023

**Dosen Pembimbing 1**



**Prof. Dr. Sri Warjiati, M.H**  
NIP.196808262005012000

**Dosen Pembimbing 2**



**Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H**  
NIP.197404142008011000

## PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Aisyah Fitri Kholifah , NIM.02040422002 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat tanggal Desember 2023 dan dapat diterima sebagai suatu persyaratan untuk menyelesaikan program pascasarjana strata dua dalam prodi Magister Hukum Tata Negara

Majelis Sidang Munaqasah:

**Ketua Penguji**

Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H  
NIP.196808262005012000

**Sekretaris Penguji**

Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H  
NIP.197404142008011000

**Penguji 1**

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H  
NIP.196803292000032001

**Penguji 2**

Dr. Khoirul Yahya, M.Si  
NIP.197202062007101003

Surabaya, 14 Desember 2023

Mengesahkan,

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



**Direktur Pascasarjana**

Prof. Masdar Hilmy, M.Ag., Ph.D

NIP.197103021996031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aisyah Fitri Kholifah  
NIM : 02040422002  
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara  
E-mail address : [aisyahfkh@gmail.com](mailto:aisyahfkh@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

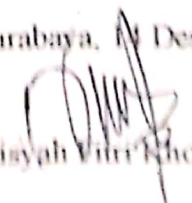
Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul : Disharmonisasi Norma Tentang Penentuan Calon Legislatif Bagi Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum 2024

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Desember 2023

  
Aisyah Fitri Kholifah



## ABSTRAK

Disharmonisasi norma dalam sistem peraturan perundang-undangan antara UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengakibatkan hukum tidak lagi dapat menjalankan fungsinya. Adanya perbedaan antara Undang-Undang Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap bakal calon legislatif dalam Pemilihan Umum membuat ketidak-sinkronan antar peraturan. sedangkan komisi pemilihan umum merupakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya setara dengan peraturan pelaksana undang-undang. Masyarakat memandang hukum sebagai suatu perwujudan hak, suatu pengertian yang menitik-beratkan pada pengaturan moral. Hukum mengatur kehidupan bermasyarakat karena tanpa hukum kehidupan bermasyarakat tidak akan bisa tertib. Menjamin adanya perlindungan yang tepat terhadap hak-hak setiap orang dan menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sehubungan dengan hak-hak tersebut. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, badan legislatif merupakan badan yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang diperlukan pengawasan yang lebih ekstra dari pembentuk produk hukum agar hukum-hukum yang baru dapat benar-benar memberikan jaminan kepastian, keadilan dan tegaknya hukum di masyarakat bukan justru sebagai perbandingan atau perbedaan yang menyebabkan tumpang tindihnya aturan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Disharmonisasi, Calon Legislatif, Pemilihan Umum

## ABSTRACT

The disharmonization of norms in the system of laws and regulation between election law number 7 of 2017 and KPU Regulation Number 20 of 2018 resulted in the law no longer being able to carry out its function. The discrepancy between the general election law and the general election commission regulation on legislative candidates in the general election creates a dissynchronization between regulation. Meanwhile, the general election commission is a law that is equivalent to the implementing regulations of the law. Society views law as a manifestation of rights, an understanding that focuses on moral regulation. The law regulates social life because without the law social life will not be orderly. Ensure the appropriate protection of the rights of everyone and determine the obligations to be fulfilled in relation to those rights. In the government system in Indonesia, the legislature is the body authorized in the formation of laws, extra supervision is needed from the framers of legal products so that the new laws can truly guarantee certainty, justice and law enforcement in society, not just as a comparison or difference that causes overlapping system of laws and regulation.

**Keywords:** Disharmonization, Legislative Candidates, General Election

## DAFTAR ISI

COVER	
COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kerangka Teoritik.....	12
1. Teori Sistem Hukum atau Stufenbau Theory Hans Kelsen.....	12
2. Teori Penegakan Hukum Lawrence Friedman.....	14
3. Teori Disharmonisasi Norma.....	17
G. Tinjauan Pustaka.....	18
H. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Masalah.....	22
3. Sumber Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
6. Metode Analisis Bahan Hukum.....	24
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II: Tinjauan Konsep Harmonisasi Norma Hukum.....	26
A. Teori Norma.....	26
B. Teori <i>Stufenbau</i> atau Teori Hukum Hans Kelsen.....	28
C. Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman.....	36
D. Teori Disharmonisasi.....	46

BAB III : Penentuan Calon Legislatif Bagi Mantan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum 2024 .....	57
A. Tinjauan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemilihan Calon Legislatif Bagi Mantan Terpidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	57
B. Tinjauan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemilihan Calon Legislatif Bagi Mantan Terpidana Korupsi Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahun 2018.....	72
BAB IV : Pembahasan dan Analisis.....	82
A. Disharmonisasi Norma dalam Pemilihan Calon Legislatif Bagi Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum 2024 .....	82
B. Penyelesaian Disharmonisasi Norma Tentang Pemilihan Calon Legislatif Bagi Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum 2024.....	89
C. Pencegahan Disharmonisasi Norma Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.....	95
BAB V : Penutup.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
BIOGRAFI PENULIS.....	113


  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Sidharta. 2006. *Hukum dan Logika*. Bandung: Penerbit Alumni
- A. Tauda, Gunawan. 2012. *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Press
- Abdullah, Amin. 2022. *Multidisiplin Interdisiplin dan Transdisiplin (Metode Study Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer)*. Yogyakarta: IB Pustaka, PT Litera Cahaya Bangsa.
- Argawati, Utami. 2022. *Penetapan Dapil Anggota Legislatif Sesuai Prinsip dalam undang-undang Pemilu, dalam media Mahkamah konstitusi: Lembaga Negara Pengawal konstitusi pada 9 November*
- Anwar. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Arif Sidarta, Bernard. 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Peanggulan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Asshiddiiqie, Jimly. 2016. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press
- \_\_\_\_\_. Jimly. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Sumber Bahan Hukum Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Budiardjo, Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (ed.Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Darmodihardjo, D. & Sidharta. 2016. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Edi Subiyanto, Ahmad. 2020. *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Inonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria. 1998. *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fuady, Amir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Kencana
- Friedman, Lawrence, M. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media
- Maria Farida. 2002. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Gandhi, L. Mahatma. 1995. *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*. Jakarta: Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia

- Goesniadi, Kusnu. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*. Malang: Nasa Media
- Guna, W dan Wan. 2011. *Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri pada Sistem Presidensiil di IndonesiaI*, (Jurist-Diction),
- Hamzah, Amdi. 2005. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen. 1945. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Harjono. 1997. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Rineka Cipta
- Haris, Syamsuddin. 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor
- Hasan Wargakusuma, Muhammad. 1997. *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Press
- Ibrahim. Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia
- Ikkal, Muhammad. 2001. *Fikih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama.
- Isra Saldi. dan Zaenal Arifin Mochtar. 2017. *Menelisik Model Kamar Parlemen, Catatan Untuk Penataan Kelembagaan DPD Indonesia*, (Media Hukum Vol.14 No.02), pada Desember.
- J Goode, William. 2020. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Jiimly, Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Johnny, Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Bakti.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid.1*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell
- Kemal Darmawan, Muhammad. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Lopa, Baharuddin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- M. Hadjo, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati. 2011. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- M. Khozim. 2018. *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*: Diterjemah dari buku Friedman M. Laurence. Bandung: Nusa Media

- M. Wantu, Fance. 2011. *idee des redcht (kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum) Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahmud Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Bagir. 1995. *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- \_\_\_\_\_. Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Inonesia*. Jakarta: Indo Hill
- \_\_\_\_\_. Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press
- Mawardi, Imam. 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilkada: Mewujudkan Electoral Justice Dalam Kerangka Hukum Negara Demokratis*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Peanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Cet.1
- Pasek Diantha, I Made. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif: dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Raharjo, Satjipto. 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni
- Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertekhnologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Rauta, Umbu. 2016. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. Jakarta: Genta Publishing.
- S. Attamimi, A. Hamid. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu studi analisis mengenai keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita IV*, dalam Disertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Safa'at, Muchamad Ali. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*, dalam Muladi (Ed.), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Refikat Aditama
- Santoso, Lukman dan Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*. Malang: Setara Press
- Sjamsudin Indradi, Samsiar. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Malang: Setara Press.
- Sjarif, Amiroeddin. 1987. *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara

- Soekanto, Soejono dan Purnadi Purbacaraka. 1993. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: BPHN- Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_. Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soemantri M, Sri. 1997. *Hak Menguji Materiil di Indonsia*. Bandung: PT. Alumni
- Soemardi. 2007. Penerjmath buku Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empiris-Deskriptif (the pure Theory of Law)* Cet.3 Edisi Revisi. Jakarta: Bee Media
- Soetandyo, Wigjosoebroto. 2007. *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah (Sebuah Pengantar ke Arahh Sosiologi Hukum)*. Malang: Bayumedia.
- Strong, CF. 2011. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media, 2011
- Sukirman. 2010. *Teori Hukum dan Sistem Hukum Internasional*. Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional.
- Syahbani, Syahrial dkk. 2013. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Triwulan Tutik, Titik. 2017. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group
- Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Wahyono,Padmo. 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind, Hill Co., Jakarta*.
- Wantu, Fance M Wantu. 2011. *idee des redcht (kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum) Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Widjaja. 1985. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Era Swasta
- Wishnu, Basuki. 2001. Penerjemah buku *American Law An Introuction Second Editioni* yang ditulis oleh Friedman M. Lawrence. Jakarta: Tata Nusa
- Yamin, Muh. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009.

### **Undang-Undang:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang-Undang No.07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan  
 Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional  
 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)  
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.14 Tahun 2018  
 Peraturan Komisi Penilaian Umum No.20 Tahun 2018  
 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara  
 Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional

### **Ensiklopedia:**

- Arlinandes Chandra, M. Jefri. dkk, *Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia*, (Jurnal Legislasi Indonesia, 2022), <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/790>
- Argawati, Utama. *Penetapan Dapil Anggota Legislatif Sesuai Prinsip dalam undang-undang Pemilu*, dalam media Mahkamah konstitusi: Lembaga Negara Pengawal konstitusi pada 9 November 2022
- Arifin dan Satria. *Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Bentuk, Penyebab dan Solusi*, Dalam Jurnal Pro Huku: DOI: <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016> published pada 2020
- Artikel Komisi Pemilihan Umum: Sejarah KPU ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)) [https://www.google.com/search?q=sejarah+kpu+pdf&rlz=1C1CHBD\\_enID1039ID1039&oq=sejarah+&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUqEAgAEEUYExgnGDsYgAQYigUyEAgAEEUYExgnGDsYgAQYigUyCAgBEEUYJxg7MgYIAhBFGDsyBggDEEUQDIGCAQRRg5MgYIBRBF GDsyBggGEEUYOzIGCAcQRRg80gEIMjY3MWowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=sejarah+kpu+pdf&rlz=1C1CHBD_enID1039ID1039&oq=sejarah+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqEAgAEEUYExgnGDsYgAQYigUyEAgAEEUYExgnGDsYgAQYigUyCAgBEEUYJxg7MgYIAhBFGDsyBggDEEUQDIGCAQRRg5MgYIBRBF GDsyBggGEEUYOzIGCAcQRRg80gEIMjY3MWowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*, dalam <http://www.docudesk.com/> diakses pada 22 Januari 2003
- Bernie, Muhammad. *KPU Berkukuh Mantan Napi Korupsi Tak Bisa Jadi Caleg*, diakses pada 4 Juni 2018 dalam <https://tirto.id/kpu-berkukuh-mantan-napi-korupsi-tak-bisa-jadi-caleg-cHg5>
- Darmawan, Aris. *Analisis Penyelesaian Disharmonisasi Norma Antara UU Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara dengan Perda Nomor 51 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara tahun 2000-2032*, (Tesis Hukum IAIN Kediri, 2018), URI: <http://digilib.iainkendari.ac.id/id/eprint/1470>
- Fahmi, Khairul. "Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas". Disertasi (Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019)
- Gabrillin, Abba. Dalam *ICW: 48 Calon Anggota Legislatif Terpilih Terlibat Korupsi*, diakses pada 4 Juni 2018 dalam (<https://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/16541981/ICW.48.calon.anggota.legislatif.terpilih.terlibat.korupsi>)

- Gandhi, L. Mahatma. *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta: 14 Oktober 1995
- Hapsari, Hanum. Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif, Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang, Vol.4 No.2/2018
- Hastuti, Evi. *Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi*, dalam Gorontalo Law Jurnal pada Oktober 2020, Vol.3 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN:2614-5022
- Iftitah Isnantiana, Nur. *Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol.2, April.2019:19-35
- Jeffri Arlinandes Chandra, Muhammad. 2022. dkk, *Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/790>
- Rifa'i, Edi. *Penegakan Hukum: Tindak Pidana Korupsi*, Lampung pada 2014. <http://repository.lppm.unila.ac.id/30745/1/buku%20PENEG%20TPK-eddy%20rifai.pdf>
- S, Imam. *Disharmonisasi Undang-Undang Polri dan KUHAP*, dalam Desertasi, Pascasarjana Hukum Universitas Brawijaya, 2017. <https://hukum.ub.ac.id/disertasi-imam-s-disharmonisasi-undang-undang-polri-dan-kuhap/>
- Sagama, Suwardi. *Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 1, Nomor.2 pada 2018. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.vli2.1967>
- Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>)
- Sidharta, *Narasi Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia: Coastal Resources Project II, 13.
- Soesetyo W. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria" (Lex Jurnalica 10 (3)), 135-147 dipublikasikan pada 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/18020-ID-disharmoni-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-agraria.pdf>
- Utami Putri, Budiarti. *Tarik Ulur Larangan KPU Soal Eks Napi Korupsi Menjadi Calon Legislatif*, diakses pada 4 Juni 2018 dalam <https://nasional.tempo.co/read/1102506/tarik-ulur-larangan-kpu-soal-eks-napi-korupsi-jadi-caleg/full&view=ok>



- Warjiyati, Sri. “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia”. Hukum Tata Negara, UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://googlescholar.sriwarjiati>
- Warjiati, Sri. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik, Hukum Tata Negara”. UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://googlescholar.sriwarjiati>
- Widyastuti, *Mekanisme Peraturan Perundang-Undangan: Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta APHTN-HAN*, Jakarta pada 21 Juli 2021 dalam [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_234\\_Pengharmonisan%20PUU.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_234_Pengharmonisan%20PUU.pdf)
- Yahya Altalib, Hisyam. “Pemimpin yang Baik dalam Pandangan Islam”. dalam Jurnal. <http://jurnal.um.ac.id>
- Yasonna L. Mantan Napi Sebagai Calon Legislatif. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45526255> dalam BBC News Indonesia pada 18 September 2018.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A